

## REKONSEPTUALISASI PENDIDIKAN TINGGI ISLAM DI DAERAH DALAM PERSPEKTIF PAULO FREIRE

Silahuddin<sup>1</sup>, Syamsul Rijal<sup>2</sup>, Randi Muhammad Gumilang<sup>3</sup>

<sup>1,2</sup>UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Indonesia

<sup>3</sup>UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda

Email : [silahuddin@ar-raniry.ac.id](mailto:silahuddin@ar-raniry.ac.id), [literasi.syamsulrijal@ar-raniry.ac.id](mailto:literasi.syamsulrijal@ar-raniry.ac.id), [randy.m.g@uinsi.ac.id](mailto:randy.m.g@uinsi.ac.id)

### Article Info

Received	Accepted	Published
1 Juli 2023	12 November 2023	30 November 2023

### Keywords:

Reconceptualization  
Islamic Higher Education  
In the area  
Paulo Freire's perspective

### ABSTRACT

This research aims to reconceptualize Islamic higher education in the region from Paulo Freire's perspective. The focus is on Paulo Freire's educational philosophy, the portrait of higher education in the region, and its reconstruction. The method used in this research is the library research method. The results showed the Freire's formulation of educational philosophy is that education introduced as the education for the oppres, namely educational system is constructed mutually with the oppressed them selves. The education system used to negate an education system which was oriented towards mastery or dominance. Awareness is the core of philosophical process offered by Freire because its human liberation and humanization can only be carried out if individuals or groups in a society are real aware of the reality of themselves and the world around them. Constructively, Islamic higher education in the regions is expected to be able to reorient towards quality aspects that go hand in hand with accessibility, which is a main part of regional government programs in the context of investing in human resources. Furthermore, the higher education curriculum is expected to be able to accommodate contemporary developments through the principles of independent learning on independent campuses by prioritizing the basic principles of humanist education, as in Paulo Freire's educational philosophy.

### ABSTRAK

### Kata Kunci:

Rekonseptualisasi  
Pendidikan Tinggi Islam  
Di Daerah  
Perspektif Paulo Freire

Penelitian ini bertujuan untuk merekonsep pendidikan tinggi Islam di Daerah perspektif Paulo Freire. Fokusnya adalah bagaimana falsafah pendidikan Paulo Freire, potret pendidikan tinggi di daerah, dan rekonstruksinya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kepustakaan. Hasilnya menunjukkan bahwa formulasi filsafat pendidikan Freire adalah pendidikan ini dikenalkan sebagai pendidikan kaum tertindas, yakni sebuah sistem pendidikan yang dikonstruksikan bersama dengan kaum tertindas tersendiri. Sistem pendidikan yang digunakan untuk menegaskan sistem pendidikan yang berorientasi pada penguasaan atau dominasi. Penyadaran merupakan inti dari proses filosofis yang ditawarkan oleh Freire, karena proses pembebasan dan pemanusiaan manusia hanya bisa dilaksanakan apabila individu maupun kelompok dari satu masyarakat telah benar-benar menyadari realitas dirinya sendiri dan dunia di sekitarnya. Secara rekonstruktif pendidikan tinggi Islam di daerah diharapkan dapat melakukan reorientasi pada aspek kualitas yang berjalan seiring dengan aksestabilitas yang menjadi bagian penting program pemerintah daerah dalam rangka investasi sumber daya manusia. Selanjutnya, secara

---

kurikulum pendidikan tinggi diharapkan dapat mengakomodasi perkembangan kekinian melalui prinsip merdeka belajar-kampus merdeka dengan mengedepankan prinsip-prinsip dasar dalam pendidikan humanis, sebagaimana yang ada dalam falsafah pendidikan Paulo Freire

---

#### **Copyright and License:**

Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) that allows others to share the work with an acknowledgment of the work's authorship and initial publication in this journal.



## **1. PENDAHULUAN**

Keberadaan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (PTKIS) merupakan bagian penting dari upaya konsisten dalam mengembangkan ilmu-ilmu agama di tengah masyarakat. (Marwan Salahuddin, 2014) Selain itu Pendidikan Tinggi Islam memiliki peran yang signifikan dalam pembangunan peradaban Bangsa Indonesia, hal ini dapat dilacak secara sosio-historis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (Indra, 2016). Sebagai langkah nyata dalam mendukung pengembangan PTKIS di Kutai Timur pemerintah terlibat secara aktif. Langkah tersebut dilakukan dengan memberikan subsidi pendidikan tinggi pada 2 (dua) lembaga pendidikan tinggi, yaitu Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian (STIPER) Kutai Timur & Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Sangatta. Namun demikian, dukungan pemerintah daerah dalam menyokong pengembangan pendidikan tinggi bersifat dilematis. Ketidadaan regulasi yang jelas dalam hal bantuan pembiayaan, konflik kepentingan dan tentu saja nuansa politik yang kental sebagai imbas dari ‘hubungan baik’ yang dibangun di tingkat daerah (DP et al., 2022).

Apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejatinya merupakan wujud dari investasi sumber daya manusia. Investasi di bidang pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang berlaku secara makro, manfaat dari investasi ini baru dapat dirasakan setelah puluhan tahun. Selain itu, biaya sosial yang ditanggung dalam bentuk *opportunity cost* harus ditanggung oleh masyarakat seluruhnya, sebagai akibat dari adanya keinginan atau kesediaan masyarakat tersebut untuk membiayai perluasan pendidikan tinggi yang mahal (Atmanti, 2005). Secara regional penyelenggaraan pendidikan di Kalimantan Timur juga ditopang oleh dukungan swasta dalam hal ini Korporasi melalui program *Corporate Social Responsibility (CSR)* yang sejalan dengan visi pembangunan berkelanjutan (Asri & Pratiwi, 2022).

Investasi dalam bidang pendidikan memiliki banyak fungsi selain fungsi teknis ekonomis yaitu fungsi sosial-kemanusiaan, fungsi politis, fungsi budaya dan fungsi kependidikan. Sebagaimana tercermin dalam indeks pembangunan manusia (IPM) yang menjadi tolok ukur bagi komitmen pembangunan yang dicanangkan oleh pemerintah (Merang Kahang, 2016). Dalam fungsi teknis ekonomis, pendidikan dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi (teori modal manusia). Orang yang memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi, diukur dengan lamanya waktu untuk menempuh pendidikan akan memiliki pekerjaan dan upah yang lebih baik dibandingkan dengan orang yang pendidikannya lebih rendah. Apabila upah mencerminkan produktivitas, maka semakin banyak orang yang memiliki pendidikan tinggi, semakin tinggi produktivitas dan hasil ekonomi nasionalnya akan tumbuh lebih tinggi. (Atmanti, 2005) Walaupun hal yang demikian tidak selalu berjalan secara linier dalam suatu garis kausalitas yang bersifat konsisten.

Namun demikian, ukuran dari peran pendidikan tinggi tidak selalu harus diukur secara kuantitatif material semata. Hal ini berpijak pada premis bahwa Perguruan Tinggi Agama Islam

memiliki peran strategis di tengah masyarakat, terutama dalam hal membangun harmoni dalam kehidupan beragama dan membangun iklim demokrasi yang kokoh. Namun demikian, ada beberapa persoalan yang mengemuka dan patut dilihat secara seksama seperti persoalan infrastruktur, pembiayaan, proses akademik, dan kualitas lulusan (Mujahidah & Ismail Suardi Wekke, 2019). Pada aspek lainnya tentu saja perguruan tinggi harus meremajakan diri dengan terus berinovasi pada berbagai bidang ilmu untuk dapat menjawab kebutuhan serta perkembangan hidup masyarakat.

Persoalan pendidikan bukanlah terutama pada target pengetahuan yang ditetapkan, melainkan pada bagaimana orang dapat berinteraksi atau berdialog dengan situasi dan kondisi zaman-nya. Oleh karena itu dibutuhkan kesadaran kritis (*critical consciousness*) yang dibangun melalui proses pendidikan sistematis, terukur dan relevan. Kesadaran kritis dapat dipahami sebagai kesadaran yang lebih melihat sistem sebagai sumber masalah dari hal-hal ideal yang semestinya dapat dicapai melalui pendidikan (A.B. Susanto, 2009). Ketidadaan kesadaran kritis dalam aspek pendidikan tinggi ini kemudian melahirkan situasi yang disebut sebagai *Banalitas Intelektual*.

Banalitas Intelektual pada pendidikan tinggi di Daerah dapat berupa pendangkalan pemikiran yang tidak disadari, merosotnya kualitas akademik dan merosotnya kualitas intelektual. Situasi banalitas intelektual terjadi pertama karena cara pandang yang terlalu mementingkan kuantitas untuk mengukur kualitas intelektual. Semangat terlalu mementingkan kuantitas ini dapat dilihat sebagai romantisme kejayaan metode induksi (Susanti, 2013) Pada beberapa situasi banalitas ini mencuat sebagai akibat dari konsekuensi logis pendidikan tinggi Islam yang tidak bergerak ke arah kemajuan serta tuntutan zaman. Hal lainnya tentu saja adalah dinamika lokal, baik secara sosial, politik maupun ekonomi yang bertindak sebagai katalisator. Sekelumit persoalan Pendidikan Tinggi di Kutai Timur di atas menjadi *subject matter*, karena beberapa *reasoning* yang kiranya dapat menjadi landasan aktual pemikiran Paulo Freire dapat digunakan dalam Rekonseptualisasi Pendidikan Tinggi di daerah.

Paulo Freire merupakan sosok yang akrab dikenal sebagai pelopor falsafah pendidikan pembebasan. Pembebasan dalam konstruksi filsafat pendidikannya menekankan pada semangat untuk keluar dan lepas dari jeratan dehumanisasi yang terjadi dalam dunia pendidikan, serta menjadi bagian penting dari realitas kehidupan masyarakat (Husni, 2020). Pendidikan dehumanisasi yang Paulo Freire maksud adalah pendidikan yang menjauhkan manusia dari fitrahnya (Abdillah, 2017). Pendidikan Islam dan paulo freire sama-sama memiliki pandangan bahwa manusia terlahir dengan fitrah-fitrah tertentu yang dapat dikembangkan melalui pendidikan yang humanis (Husni, 2020). Sebagai wujud aktual untuk dapat lepas dari jeratan penindasan (dehumanisasi), maka Freire mengutarakan gagasan tentang pendidikan kritis. Pendidikan kritis merupakan pendidikan yang berorientasi pada aktualisasi diri sepenuhnya (Agustinus Ryadi, 2020).

Freire mampu menguraikan pemikiran filsafat yang rumit dan argumentatif menjadi sangat aktual pada situasi kehidupan yang aktual, serta mengejewantahkannya dalam tuntutan-tuntutan praktis masa kini, terutama dalam bidang pendidikan (Wahid, 2011). Freire dengan rendah hati mengakui bahwa gagasannya adalah akumulasi dari gagasan para pemikir pendahulunya seperti Jean Paul Sartre, Althusser, Mounier, Ortega Y Gasset, Unamuno, Martin Luther King Jr., Che Guevara, Fromm, Mao Tse Tung, Marcuse dan lainnya. Freire hanya menampilkan semua gagasan besar tersebut dengan cara yang unik dan membarui, serta dengan tingkat aksi yang berlaku secara luas dalam bidang pendidikan.

Paulo Freire menyumbangkan filsafat pendidikan yang datang bukan hanya dari pendekatan klasik dari Plato, tetapi juga dari pemikir Marxis dan Anti-Kolonial. Bahkan, dalam banyak cara, bukunya, *Pendidikan Kaum Tertindas*, dapat dibaca sebagai perluasan dari atau jawaban terhadap

buku Frantz Fanon, *The Wretched of The Earth*, yang memberikan penekanan yang kuat tentang perlunya memberikan penduduk pribumi pendidikan yang baru dan modern dan anti colonial (A.B. Susanto, 2009). Pendidikan kritis Paulo Freire mempunyai corak kesamaan ide dengan konsep pendidikan Islam secara khusus yaitu pendidikan sebagai wadah untuk mengembangkan potensi peserta didik yang membebaskan. Pendidikan kritis dan pendidikan Islam, memiliki relevansi dalam orientasi dan proses pendidikan. Pendidikan kritis dan pendidikan Islam sama-sama sangat menekankan humanisasi dan pembebasan sebagai orientasi pendidikan, serta menempatkan peserta didik dan pendidik sama-sama sebagai subjek dalam proses belajar mengajar (Muhammad Zamroji, 2016). Berpijak pada argumentasi di atas maka tulisan ini mencoba untuk mengkaji dan menguraikan tentang rekonseptualisasi pendidikan tinggi di daerah dalam perspektif Paulo Freire.

## 2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (Library Research). Penelitian kepustakaan adalah suatu metode penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dan menganalisis informasi dari berbagai sumber literatur atau karya tulis yang relevan dengan topik penelitian yang sedang diteliti (Sari, 2020). Penelitian kepustakaan seringkali menjadi langkah awal dalam suatu penelitian, membantu peneliti memahami dan mengidentifikasi gap pengetahuan (kesenjangan dalam literatur), mengevaluasi teori-teori yang ada, dan merumuskan pertanyaan penelitian yang lebih spesifik. Metode ini tidak melibatkan pengumpulan data primer melalui observasi, eksperimen, atau wawancara langsung dengan responden. Sebaliknya, penelitian kepustakaan lebih fokus pada studi terhadap tulisan-tulisan yang telah ada, seperti buku, jurnal, artikel, dan dokumen-dokumen lainnya.

Langkah-langkah yang dilakukan peneliti dalam penelitian kepustakaan yaitu: peneliti mengidentifikasi sumber-sumber literatur yang relevan, membaca dan memahami isi literatur, menganalisis kritis terhadap konsep-konsep dan teori yang ada, serta menyusun sintesis atau rangkuman dari informasi yang ditemukan. Hasil dari penelitian kepustakaan dapat digunakan untuk membangun kerangka teoritis, mendukung argumentasi, atau menyajikan pandangan literatur terkini tentang suatu topik.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1. Falsafah Pendidikan Paulo Freire

#### *Biografi*

Paulo Freire dilahirkan pada 19 September 1921 di Recife, Brazil yang dikenal sebagai daerah paling miskin dan terbelakang. Dalam kondisi kemiskinan inilah dirinya dipaksa oleh keadaan untuk memahami realitas sosio masyarakat. Freire, sempat mengenyam karir yang singkat sebagai seorang pengacara. Kemudian, menjadi guru bahasa portugis selama 6 tahun (1941-1947). Pada tahun 1944 Freire menikah dengan Elza Maia Costa Oliveira. Melalui pernikahan inilah kemudian memantapkan minat serta komitmennya dalam dunia pendidikan (Pramudya, 2001). Tahun 1959 dijadikan sebagai tahun awal munculnya ide-ide mengenai pendidikan melalui kajian disertasinya di Universitas Recife. Paulo Freire pun juga pernah menjalani kehidupannya di balik jeruji besi setelah beberapa gagasannya dinilai sering menentang kebijakan pemerintah. (Supriyanto, 2013)

Setelah bebas dari penjara ia kemudian ‘dipersilahkan’ untuk meninggalkan negeri tempat kelahirannya, mengembara selama 15 tahun, pada mulanya di Bolivia, kemudian Chili, untuk bergabung dengan salah satu organisasi besar dunia yaitu UNESCO. Pada 1969 menjadi *Visiting Professor* di Universitas Harvard. Selanjutnya antara tahun 1969-1979 mengabdikan sebagai penasihat

husus bidang pendidikan pada Dewan Gereja Dunia di Jenewa, Swis. Selanjutnya, 1979 kembali ke Brazil dan menduduki jabatan pending di Universitas Sao Paulo. Lalu pada tahun 1988 ditunjuk menjadi Menteri Pendidikan untuk Kota Sao Paulo, sebuah posisi yang memberikannya jalan mereformasi sistem pendidikan sekolah yang ada disana. Freire meninggal pada 2 Mei 1997 akibat penyakit Jantung. (Pramudya, 2001) Sepanjang kehidupannya telah memberikan banyak inspirasi dan keteladanan dalam keberpihakan terhadap kaum marginal.

### **Karya-karya**

Freire telah menulis berbagai buku dan makalah dalam bahasa Portugis dan spanyol. Beberapa karyanya yang telah diterbitkan diantaranya adalah:

- a. *Pedagogy of The Oppressed*, terjemahan edisi Indonesia berjudul Pendidikan Kaum Tertindas.
- b. *Cultural Action For Freedom*, terjemahan edisi Indonesia berjudul Aksi Kultural Untuk Pembebasan.
- c. *Education For Critical Consciousness*, terjemahan edisi Indonesia berjudul Pendidikan Untuk Kesadaran Kritis.
- d. *Education: The Practice of freedom*, terjemahan edisi Indonesia berjudul Pendidikan Sebagai Praktek Pembebasan.
- e. *The Politics of Education: Culture, Power and Liberation*, terjemahan edisi Indonesia berjudul Politik Pendidikan: Kebudayaan, Kekuasaan, dan Pembebasan.
- f. *Educacao Como Pratica de Liberdade*, terjemahan edisi Indonesia berjudul Pendidikan yang membebaskan.
- g. *Pedagogy in Process: The Letters to Guinea-Bissau*, terjemahan edisi Indonesia berjudul Pendidikan Sebagai Proses.
- h. *Pedagogy of The Heart*, terjemahan edisi Indonesia berjudul Pedagogy Hati.
- i. *Pedagogy of The Hope*, terjemahan edisi Indonesia berjudul Pedagogy Pengharapan.

### **Filsafat Pendidikan**

Paulo Freire sebenarnya tidak memunculkan satu pun cabang filsafat dari banyaknya teori pendidikan yang ia kemukakan, namun teori Freire tentang realitas, teorinya tentang pengetahuan atau aksiologinya, sebenarnya semua itu digunakan dengan maksud, agar mengetahui suatu pendekatan untuk memahami pedagoginya. Secara filosofis, pemikiran Freire dipengaruhi oleh aliran Fenomenologis, Perenialisme, Eksistensialisme dan Marxisme. Sebagai tokoh pendidikan, Freire dapat dianggap sebagai figur utama aliran Rekonstruksionisme (Pramudya, 2001).

Freire memiliki distingsi genealogis dalam basis kultural maupun aktualisasi gerakannya. Freire lahir dan besar di negara berkembang (Brazil), serta mengabdikan diri pada masyarakat dunia ketiga di berbagai kawasan Dunia. Freire, adalah salah satu dari pendidik paling berpengaruh di abad ke-20 yang merekonstruksi model pendidikan masyarakat marginal.

### **Pendidikan Humanis**

Humanisasi adalah satu-satunya pilihan bagi kemanusiaan, karena walaupun dehumanisasi adalah kenyataan yang terjadi sepanjang sejarah peradaban manusia dan tetap merupakan suatu kemungkinan ontologis di masa mendatang, namun ia bukanlah suatu keharusan sejarah. Secara dialektis suatu kenyataan tidaklah mesti menjadi suatu keharusan, jika kenyataan menyimpang dari keharusan maka menjadi tugas manusia untuk merubahnya agar sesuai dengan apa yang seharusnya inilah fitrah manusia yang sejati (Wahid, 2011).

Salah satu langkah penting dalam mewujudkan pendidikan yang humanis ialah dengan menghadirkan literasi kritis. Penelitian yang dilakukan oleh Paulo Freire menyimpulkan bahwa pembelajaran literasi harus tertuju pada membaca kata dan membaca dunia atau membaca teks dan konteks. Pada program penyadaran kaum tertindas akan humanitas mereka yang mampu menggenggam dunia. Proses penyadaran menggunakan pendekatan praksis yaitu melalui refleksi kritis akan situasi sosial dan historis (Hendriani, 2018).

Pendidikan humanis harus dilihat sebagai upaya restoratif dalam menata pendidikan nasional, khususnya pendidikan tinggi yang ada di daerah (Damayanti & Sasongko, 2021). Ruh dasar dari pendidikan humanis ini adalah penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia, keadilan sosial dan penerapan pendidikan berbasis realitas (Amiruddin, 2015).

### ***Pendidikan Penyadaran***

*Pertama*, kesadaran magis (*magical consciousness*) adalah kesadaran masyarakat yang tidak mampu melihat kaitan antara satu faktor dengan faktor lain (Muhammad Fahmi, Hanik Yuni Alfiah & Adienk, 2021). Misalnya, masyarakat miskin yang tidak mampu melihat kaitan antara kemiskinan mereka dengan sistem politik dan kebudayaan. Kesadaran ini lebih melihat pada faktor di luar manusia (*natural* maupun *supranatural*) sebagai penyebab dari ketidakberdayaannya. Proses pendidikan yang menggunakan logika ini tidak memberikan kemampuan analisis, kaitan antara sistem dan struktur terhadap suatu permasalahan masyarakat. Peserta didik secara dogmatis menerima kebenaran dari guru, tanpa ada mekanisme untuk memahami makna ideologis dari setiap konsepsi kehidupan masyarakat.

*Kedua*, kesadaran naif (*naival consciousness*) yang melihat aspek manusia menjadi akar permasalahan dalam masyarakat. Muhammad Fahmi, Hanik Yuni Alfiah And Adienk. Dalam kesadaran ini, masalah etika, kreativitas, *need for achievement* dianggap sebagai penentu perubahan sosial. Jadi dalam menganalisis mengapa suatu masyarakat miskin, mereka menganggap hal itu karena salah mereka sendiri. Oleh karena itu, *man power development* (membangun kekuatan manusia) adalah sesuatu yang diharapkan sebagai pemicu perubahan. Pendidikan dalam konteks ini tidak mempertanyakan sistem dan struktur, bahkan sistem dan struktur dianggap sudah baik dan benar, dan merupakan faktor *given*, sehingga tidak perlu dipertanyakan lagi. Tugas pendidikan adalah bagaimana mengarahkan peserta didik agar bisa beradaptasi dengan sistem yang sudah ada.

*Ketiga*, kesadaran kritis (*critical consciousness*) yang melihat aspek sistem dan struktur sebagai sumber masalah. Muhammad Fahmi, Hanik Yuni Alfiah And Adienk. Pendidikan mencoba menganalisis secara kritis sistem dan struktur sosial, politik, ekonomi, budaya, dan konteks masyarakat lainnya. Paradigma kritis dalam pendidikan adalah melatih peserta didik agar mampu mengidentifikasi ketidakadilan dalam sistem dan struktur yang ada, kemudian menganalisis bagaimana sistem itu bekerja, serta bagaimana mentransformasikannya. Tugas pendidikan dalam paradigma ini adalah menciptakan ruang dan kesempatan agar peserta didik terlibat aktif dalam proses penciptaan struktur yang secara fundamental baru dan lebih baik.

Pendidikan Freire yang dialogis banyak ditujukan menggerakkan masyarakat yang masih berkesadaran naif, magis, atau fanatik, menuju ke kesadaran kritis. Metode ini didasarkan atas dialog, yang merupakan perhubungan antar orang secara horizontal. Secara metodik Freire menawarkan model pendidikan yang bersifat egaliter. Pola pendidikan dilakukan dengan pendekatan praksis hadap masalah. Kemudian, mengganti kesadaran magis dan naif dalam paradigma pendidikannya. Selanjutnya menanamkan prinsip dasar kesadaran kritis dan transformative (Hanif, 1970).

### 3.2. Potret Pendidikan Tinggi di Daerah

#### *Otonomi Daerah dan Kebijakan Pemerintah*

Otonomi Daerah melahirkan peluang tersendiri dalam pengembangan serta dukungan terhadap Pendidikan Tinggi Islam, seperti halnya di Kutai Timur. Dimana secara operasional penyelenggaraan pendidikan tinggi memperoleh dukungan finansial berupa dana hibah dari Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, salah satunya tertuang dalam Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 42 tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Sosial, Hibah dan Subsidi Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (PB Kutai Timur, 2010).

Melalui landasan hukum tersebut, maka sejak tahun 2001 pendidikan tinggi di Kutai Timur telah berlangsung secara gratis di Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian (STIPER). Adapun untuk Pendidikan Tinggi Islam yang dijalankan oleh Sekolah tinggi Agama Islam (STAI) Sangatta pada tahun 2007. Menurut Sekretaris Kabupaten Kutai Timur Irawansyah untuk menggratiskan biaya pendidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian atau STIPER Kutim, Pemkab harus mengalokasikan anggaran pendidikan dari APBD Kutim berupa dana hibah sebesar Rp 7 sampai Rp 8 Miliar pertahun. Sementara untuk STAIS sendiri hanya berkisar Rp 5 Miliar pertahun (Kabar Etam, 2019).

Angka-angka tersebut tentu saja tidak berlaku secara ajeg, namun secara fluktuatif mengalami pasang surut yang menjadi persoalan tersendiri baik bagi pemerintah daerah, maupun perguruan tinggi penyelenggara. Karena dinamika sosial, politik dan ekonomi terjadi baik di tingkat nasional maupun lokal mempengaruhi keputusan serta kebijakan politik dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi. Hal yang demikian semakin mengukuhkan suatu perspektif bahwa kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan menjadi bagian penting dalam polarisasi transaksional dalam jalannya pemerintahan. Sehingga politik pendidikan yang terjadi merangsek pada berbagai dimensi penyelenggaraan pendidikan di daerah.

#### *Implementasi Pendidikan Tinggi Islam di Daerah*

Secara implementatif apa yang diharapkan dari *Tri Dharma* Perguruan Tinggi tidak dapat berjalan maksimal, hal ini disebabkan oleh beberapa hal yang mendasar seperti dukungan anggaran yang minim, sehingga menjadi hambatan dalam penyelenggaraan maupun tata kelola serta pengembangan perguruan tinggi. Pada aspek tata kelola dan manajerial pengelolaan pendidikan tinggi di daerah, secara determinan menunjukkan bahwa aspek tata kelola memiliki korelasi dalam berbagai unsur penyelenggaraan pendidikan tinggi mulai dari kinerja pendidik dan kompetensi lulusan (Y. Siswadi et al., 2020). Fakta yang menunjukkan bahwa terdapat berbagai persoalan krusial dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di daerah, mulai dari sarana dan prasarana yang kurang memadai; optimalisasi kinerja tenaga pendidik dan kependidikan; tata manajemen perguruan tinggi; dan belum optimalnya kualitas lulusan (Yuliawati, 2012)

Politik Pendidikan dalam dunia perguruan tinggi di Indonesia masih menjadi persoalan yang serius. Perkara aksestabilitas, dikotomi keilmuan, hingga menyoal pada kualitas dan mutu pendidikan tinggi yang ditawarkan adalah sekelumit persoalan krusial yang mengemuka (Jubba & Pabbajah, 2018). Pengelola Perguruan Tinggi dituntut untuk memenuhi akuntabilitas baik kepada masyarakat maupun pemerintah. Adanya otonomi yang lebih luas pada perguruan tinggi harus disikapi dengan adanya tanggung jawab dari pengelola perguruan tinggi. (H.A. Kartiwa, 2002)

Hal yang sangat krusial dalam menunjang jalannya proses pendidikan tentu saja terkait dengan pengembangan paradigma keilmuan (kurikulum), kemudian ditekankan pada pengembangan individu yang mencakup keterkaitannya dengan lingkungan sosial setempat. Pendidikan harus mengantisipasi tuntutan hidup, sehingga dapat mempersiapkan peserta didik untuk hidup wajar

sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat. Dalam konteks ini kurikulum sebagai program pendidikan harus dapat menjawab tantangan dan tuntutan masyarakat (Afiful Ikhwani, 2016).

Oleh karena itu pendidikan harus melibatkan tiga unsur sekaligus dalam hubungan dialektis yang terjadi antara pendidik, peserta didik dan lingkungan kehidupan (realitas dunia). Pendidik dan peserta didik keduanya adalah subjek yang sadar secara kognitif, sementara yang lingkungan kehidupan adalah objek yang tersadari atau menyadari dirinya dalam hal inilah realitas dunia dalam hubungan yang bersifat dialektis (Wahid, 2011). Kondisi semacam inilah yang kerap kali menjadi persoalan serius pada sistem pendidikan tinggi saat ini, khususnya pada pendidikan tinggi di Kutai Timur. Sebagai langkah strategis dalam membangun organisasi pendidikan tinggi yang baik, maka perlu dilakukan beberapa langkah-langkah yang mencakup perbaikan pada aspek kapasitas institusional; menciptakan sistem tata kelola yang sehat; keuangan; sumber daya manusia; dan jaminan kualitas (Muhammad Hanif, 2019).

Secara khusus lain-lainnya yang menjadi polemik dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di daerah adalah soal kepemimpinan lembaga, dimana segala sesuatunya menjadi sangat politis berimbas pada figur yang menjadi pemimpin di perguruan tinggi, praktiknya mengesampingkan prinsip profesional, kapasitas dan kapabilitas yang memadai. Artinya pemimpin perguruan tinggi adalah figur yang memiliki *Political Connection* dengan penguasa di daerah. Hal tersebut menegaskan fakta bahwa kepemimpinan lembaga pengelola pendidikan tinggi berperan secara eksistensial dalam mengelola manajemen, dimana profesionalitas, inovasi, visi organisasi, dan kerjasama menjadi bagian krusial bagi pengembangan kelembagaan (M. Ihsan Dacholfany, 2013).

### 3.3. Rekonstruksi Pendidikan Tinggi Islam di Daerah

Langkah awal sebagai pertimbangan rekonstruktif dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi Islam di daerah dapat dimulai dengan menata aspek aksestabilitas dan kualitas pendidikan. Aksestabilitas dan kesesuaian antara kebutuhan zaman serta pertimbangan-pertimbangan yang bersifat humanistik dalam mengejawantahkan nilai-nilai kemanusiaan dalam kehidupan manusia (Fauzi, 2021) Sehingga *output* yang dihasilkan melalui mutu lulusan memiliki semacam kompatibilitas dengan realitas zaman tempat dimana masyarakat hidup.

Selanjutnya, pendidikan tinggi di daerah seyogyanya menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dalam menyelesaikan masalah, serta mampu menelaah persoalan. Kompetensi tersebut dalam konstruksi merdeka belajar saat ini disebut sebagai *High Order Thinking Skill*. (G. A. Siswadi, 2022) Kompetensi-kompetensi tersebut bersifat aktual dan berkaitan langsung dengan ruang hidup masyarakat. Hal yang demikian menegaskan kembali konsep *link and match* antara pengajaran di perguruan tinggi dengan kebutuhan yang ada di tengah masyarakat.

Sebagai ikhtisar dari upaya rekonstruktif, maka filsafat pendidikan Freire yang digunakan dalam pendidikan Islam sejatinya berorientasi pada penyelesaian masalah dalam kehidupan peserta didik, kemudian menuntut untuk diimplementasikan dengan cara menghubungkannya pada epistemologi Islam yakni Alquran dan Hadis. (Robikhah, 2018) Oleh sebab itu maka penguatan pengkajian epistemologi Islam harus menjadi bagian dari kultur akademik yang di bangun dalam tridharma Perguruan Tinggi yang mencakup aspek pendidikan/ pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

## 4. KESIMPULAN

Hal yang paling menarik dari formulasi filsafat pendidikan Freire adalah pendidikan ini dikenalkan sebagai pendidikan kaum tertindas, yakni sebuah sistem pendidikan yang dikonstruksikan bersama dengan kaum tertindas tersendiri. Artinya filsafat pendidikan ini bukan



diperuntukkan bagi segelintir orang, tapi dibangun bersama secara kolektif oleh entitas masyarakat yang mengejawantah pada kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah. Sistem pendidikan yang diterapkan pada pendidikan tinggi semestinya dapat menegaskan sistem yang berorientasi pada penguasaan atau dominasi dari akal budi peserta didik. Oleh sebab itu penyadaran merupakan inti dari proses filosofis yang ditawarkan oleh Freire, karena proses pembebasan dan pemanusiaan manusia hanya bisa dilaksanakan apabila individu maupun kelompok dari satu masyarakat telah benar-benar menyadari realitas dirinya sendiri dan dunia di sekitarnya.

Selanjutnya, secara kurikulum pendidikan tinggi diharapkan dapat mengakomodasi perkembangan kekinian melalui prinsip merdeka belajar-kampus merdeka dengan mengedepankan prinsip-prinsip dasar dalam pendidikan humanis, sebagaimana yang ditawarkan melalui filsafat pendidikan dari Freire. Penyesuaian yang cepat dengan didukung oleh kebijakan pemerintah memberikan suatu harapan bagi peningkatan kualitas pendidikan di daerah. Hal ini dapat dimulai dengan berbagai langkah konstruktif dari kebijakan terdahulu. Kemudian, secara rekonstruktif pendidikan tinggi Islam di daerah diharapkan dapat melakukan reorientasi pada aspek kualitas yang berjalan seiring dengan aksestabilitas bagi setiap individu peserta didik. Hal inilah yang menegaskan bahwa penyelenggaraan pendidikan tinggi adalah bagian penting program pemerintah daerah dalam rangka investasi sumber daya manusia.

## REFERENCES

- A.B. Susanto. (2009). Pendidikan Penyadaran Paulo Freire. *At-Ta'dib*, 4(1), 81–100. <https://doi.org/10.21111/at-tadib.v4i1.574>
- Abdillah, R. (2017). Analisis Teori Dehumanisasi Pendidikan Paulo Freire. *Jurnal Aqidah Dan Filsafat Islam*, 2(1), 1–21. <https://doi.org/10.15575/jaqfi.v2i1.4247>
- Afiful Ikhwan. (2016). Perguruan Tinggi Islam dan Integrasi Keilmuan Islam : Sebuah Realitas Menghadapi Tantangan Masa Depan. *Jurnal Ilmu Tarbiyah "At-Tajdid,"* 5(2), 159–187.
- Agustinus Ryadi. (2020). Pendidikan Kritis yang Membebaskan. *Jurnal Filsafat Arete*, IX(1), 12–27. <https://doi.org/10.33508/arete.v9i1.4037>
- Amiruddin. (2015). Pendidikan Humanis Dalam Perspektif Paulo Freire dan Tan Malaka. *Kariman*, 01(01), 17–34. <https://doi.org/10.52185/kariman.v3i1.48>
- Asri, D., & Pratiwi, G. (2022). Peran Korporasi Dalam Pencapaian Program SDGs di Indonesia (Studi kasus Pelaksanaan CSR bidang Pendidikan di Kab. Paser - Kalimantan Timur). 4(2). <https://doi.org/10.31595/biyan.v4i2.715>
- Atmanti, H. D. (2005). Investasi Sumber Daya Manusia Melalui Pendidikan. *Dinamika Pembangunan*, 2(1), 30–39.
- Damayanti, C., & Sasongko, Y. P. D. (2021). Restorasi Dunia Pendidikan di Indonesia dalam Perspektif Paulo Freire. *Riset Intervensi Pendidikan (JRIP)*, 3(1), 61–70.
- DP, I., Ernas, S., Razak, M., & Wakano, A. (2022). Keterlibatan Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Pendidikan Tinggi (Fenomena Di Provinsi Maluku). *Al-Iltizam: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 7(1), 133. <https://doi.org/10.33477/alt.v7i1.3042>
- Fauzi, M. I. (2021). Paulo Freire dan Pendidikan untuk Transformasi Sosial Abad 21. *Prosiding Seminar Nasional Pascasarjana (PROSNAMPAS)*.
- H.A. Kartiwa. (2002). Akuntabilitas dan Standarisasi Kualitas Perguruan Tinggi Swasta di Daerah. *Educare*, 1(1), 19–28.
- Hanif, M. (1970). Desain Pembelajaran untuk Transformasi Sosial: Studi Perbandingan Pemikiran

- Paulo Freire dan Ivan Illich tentang Pendidikan Pembebasan. *KOMUNIKA: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi*, 8(2), 113–128. <https://doi.org/10.24090/komunika.v8i2.752>
- Hendriani, A. (2018). Pedagogik Literasi Kritis ; Sejarah, Filsafat Dan Perkembangannya Di Dunia Pendidikan. *Pedagogia*, 16(1), 44. <https://doi.org/10.17509/pdgia.v16i1.10811>
- Husni, M. (2020). Memahami Pemikiran Karta Paulo Freire “Pendidikan Kaum Tertindas” Kebebasan dalam Berpikir. *Al-Ibrah*, 5(2), 41–60.
- Indra, H. (2016). Pendidikan Tinggi Islam dan Peradaban Indonesia. *Al-Tahrir*, 16 no.1, 109–132. <https://doi.org/10.21154/al-tahrir.v16i1.317>
- Jubba, H., & Pabbajah, M. (2018). Politik Pendidikan Indonesia: Ketimpangan Dan Tuntutan Pemenuhan Kualitas Sumber Daya. *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam*, 10(1), 50. <https://doi.org/10.30739/darussalam.v10i1.267>
- Kabar Etam. (2019). Sejak Tahun 2001 Kutim Sudah Gratiskan Biaya Pendidikan Hingga Kuliah. *Kabar Etam News*. <https://kabaretam.com/2019/07/08/sejak-tahun-2001-kutim-sudah-gratiskan-biaya-pendidikan-hingga-kuliah/>
- M. Ihsan Dacholfany. (2013). Peran Kepemimpinan Perguruan Tinggi Islam dalam Pembangunan Peradaban Islami. *Nizham*, 1(2), 147–164.
- Marwan Salahuddin. (2014). Model Pengembangan Pendidikan Tinggi Islam di Indonesia. *Ulumuna Jurnal Studi Keislaman*, 18(1), 121–138. <https://doi.org/10.20414/ujis.v18i1.155>
- Merang Kahang, M. S. & R. B. S. (2016). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Pembangunan manusia Di Kabupaten Kutai Timur. 18(2), 130–140. <https://doi.org/10.30872/jfor.v18i2.863>
- Muhammad Fahmi, Hanik Yuni Alfiah, S. A. P., & Adienk, F. M. S. (2021). Menyandingkan Pendidikan Pembebasan Paulo Freire dengan Pendidikan Islam. *Jurnal Tarbawi STAI Al Fithrah*, 10(1), 1–31. <https://doi.org/10.2207/jjws.91.328>
- Muhammad Hanif. (2019). Strategi Pengembangan Program Studi Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi Islam. *Andragogi : Jurnal Ilmiah Pendidikan Agama Islam*, 1(2), 1–9. <https://doi.org/10.33474/ja.v1i2.4977>
- Muhammad Zamroji. (2016). Relevansi Pendidikan Kritis Paulo Freire Dengan Pendidikan Islam. *At-Tahdzib : Jurnal Studi Islam Dan Muamalah*, 4(1), 171–194.
- Mujahidah & Ismail Suardi Wekke. (2019). Transformasi Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Indonesia. *Seminar Nasional Kepemimpinan Transformatif Forum Dosen Indonesia DPD Papua Barat & Pasca Sarjana STAIN Sorong Sorong, 26 Mei 2019*, 1–17. <https://doi.org/10.18860/jmpi.v2i1.4354>
- PB Kutai Timur. (2010, November 8). Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Sosial, Hibah dan Subsidi Pemerintah Kabupaten Kutai Timur. *Kutai Timur*.
- Pramudya, W. (2001). Mengenal Filsafat Pendidikan Paulo Freire : Antara Banking Concept of Education, Problem Posing Method, dan Pendidikan Kristen di Indonesia . *Veritas: Jurnal Teologi Dan Pelayanan*, 2(2), 245–255. <https://doi.org/10.36421/veritas.v2i2.63>
- Robikhah, A. S. (2018). Paradigma Pendidikan Pembebasan Paulo Freire Dalam Konteks Pendidikan Agama Islam. *IQ (Ilmu Al-Qur'an): Jurnal Pendidikan Islam*, 1(01), 1–16. <https://doi.org/10.37542/iq.v1i01.3>
- Sari, M. (2020). Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan. *Natural Science: Jurnal Penelitian Bidang IPA Dan Pendidikan IPA*, 6(1), 41–53. <https://ejournal.uinib.ac.id/jurnal/index.php/naturalscience/article/view/1555/1159>
- Siswadi, G. A. (2022). Pemikiran Filosofis Paulo Freire Terhadap Persoalan Pendidikan Dan

- 
- Relevansinya Dengan Sistem Merdeka Belajar Di Indonesia. *Guna Widya: Jurnal Pendidikan Hindu*, 9(2), 142–153. <https://doi.org/10.25078/gw.v9i2.164>
- Siswadi, Y., Radiman, Jufrizen, & Muslih. (2020). Model Faktor Determinan Kompetensi Lulusan Perguruan Tinggi Islam Swasta di Kota Medan Determinant Competency Factor Models for Graduates Private Islamic College in Medan City. *JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 12(1), 230–242. <https://doi.org/10.24114/jupiis.v12i1.17229>
- Supriyanto. (2013). Paulo Freire: Biografi Sosial Intelektual Modernisme Pendidikan. *Jurnal Al-Ta'dib*, 6(2), 99–115. <https://doi.org/10.31332/atdb.v6i2.308>
- Susanti, A. J. A. (2013). Banalitas Intelektual Dalam Dunia Pendidikan Perguruan Tinggi Suatu Kajian Filsafat Ilmu. *Jurnal Filsafat Arete*, 02 – Nomor, 160–172. <https://doi.org/10.33508/arete.v2i2.822>
- Wahid, M. (2011). Filsafat Pendidikan Paulo Freire. *Dedikasi*, 1(3), 99–114.
- Yuliawati, S. (2012). Kajian Implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi Sebagai Fenomena Pendidikan Tinggi di Indonesia. *Widya*, 29(318), 28–33.